



**BPS PROVINSI GORONTALO**

**Laporan Keuangan**  
**BPS Provinsi Gorontalo**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023**  
**(Audited)**



**BPS Provinsi Gorontalo**  
**Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe No.117 Kel. Wongkaditi Timur, Kec.**  
**Kota Utara, Kota Gorontalo - Provinsi Gorontalo**

## Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Provinsi Gorontalo adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Provinsi Gorontalo. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Gorontalo, 02 Mei 2024  
Kepala,



Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si  
NIP.197206011994121001



## DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Daftar Lampiran	
Indeks Singkatan	
Pernyataan Tanggung Jawab	
I. Ringkasan	
Ii. Laporan Realisasi Anggaran	
Iii. Neraca	
Iv. Laporan Operasional	
V. Laporan Perubahan Ekuitas	
Vi. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	
A.2 Profil Dan Kebijakan Teknis	
A.3 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	
A.4 Basis Akuntansi	
A.5 Dasar Pengukuran	
A.6 Kebijakan Akuntansi	
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	
B.2 Belanja Negara	
B.3 Belanja Pegawai	
B.4 Belanja Barang	
B.5 Belanja Modal	
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	
C.1 Persediaan	
C.2 Tanah	
C.3 Peralatan Dan Mesin	
C.4 Gedung Dan Bangunan	
C.5 Aset Tetap Lainnya	
C.6 Akumulasi Penyusutan	
C.7 Aset Tak Berwujud	
C.8 Aset Lain-lain	
C.9 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	

- C.10 Utang Kepada Pihak Ketiga
- C.11 Ekuitas
- D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional
  - D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya
  - D.2 Beban Pegawai
  - D.3 Beban Persediaan
  - D.4 Beban Barang Dan Jasa
  - D.5 Beban Pemeliharaan
  - D.6 Beban Perjalanan Dinas
  - D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi
  - D.8 Kegiatan Non Operasional
- E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
  - E.1 Ekuitas Awal
  - E.2 Surplus/defisit-lo
  - E.4 Transaksi Antar Entitas
    - E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)
    - E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar
  - E.5 Ekuitas Akhir
- F. Pengungkapan Lainnya

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Uraian Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	
Tabel 4	Rincian Anggaran	
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja	
Tabel 9	Perbandingan Belanja Pegawai	
Tabel 10	Perbandingan Belanja Barang	
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Tabel 13	Rincian Persediaan	
Tabel 14	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	
Tabel 15	Rincian Aset Tak berwujud	
Tabel 16	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	
Tabel 17	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	
Tabel 18	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	
Tabel 19	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	
Tabel 20	Rincian Beban Pegawai	
Tabel 21	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	
Tabel 22	Rincian Beban Persediaan	
Tabel 23	Rincian Beban Barang dan Jasa	
Tabel 24	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	
Tabel 25	Rincian Beban Pemeliharaan	
Tabel 26	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	
Tabel 27	Rincian Beban Perjalanan Dinas	
Tabel 28	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	
Tabel 29	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	
Tabel 30	Rincian Kegiatan Non Operasional	
Tabel 31	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	
Tabel 32	Rincian Transfer Masuk	
Tabel 33	Rincian Transfer Keluar	

;

## PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Gorontalo, 02 Mei 2024

Kepala,



Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si  
NIP.197206011994121001



## INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

### **1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp3.514.098.492 atau mencapai 99,96 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp3.515.587.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.064.088.746 atau mencapai 99,12 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp17.216.283.000.

### **2. NERACA**

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2023. Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp21.106.832.676 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp215.629.620 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp20.883.386.421 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp7.816.635.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp276.913.478 dan Rp20.829.919.198.

### **3. LAPORAN OPERASIONAL**

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.514.098.492, sedangkan jumlah beban dari

kegiatan operasional adalah sebesar Rp17.386.788.376 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp13.872.689.884. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar minus Rp44.964.668 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp13.917.654.552.

#### **4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp21.862.708.638 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp13.917.654.552 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.884.865.112 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah senilai Rp20.829.919.198.

#### **5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

**I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN REALISASI ANGGARAN**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023		% terhadap Anggaran	31 Desember 2022
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	3.515.587.000	3.514.098.492	99,96	107.127.099
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.515.587.000</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>99,96</b>	<b>107.127.099</b>
Belanja Negara	B.2	17.216.283.000	17.064.088.746	99,12	13.668.448.168
Belanja Pegawai	B.3	7.218.351.000	7.199.489.082	99,74	7.802.591.100
Belanja Barang	B.4	9.801.321.000	9.668.232.164	98,64	5.831.034.568
Belanja Modal	B.5	196.611.000	196.367.500	99,88	34.822.500
<b>JUMLAH BELANJA</b>		<b>17.216.283.000</b>	<b>17.064.088.746</b>	<b>99,12</b>	<b>13.668.448.168</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**NERACA**  
**Per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Persediaan	C.1	215.629.620	668.930.088
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>215.629.620</b>	<b>668.930.088</b>
<b>PIUTANG JANGKA PANJANG</b>			
<b>Jumlah Piutang Jangka Panjang</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ASET TETAP</b>			
Tanah	C.2	4.861.957.000	4.861.957.000
Peralatan Dan Mesin	C.3	14.196.157.633	14.490.440.233
Gedung Dan Bangunan	C.4	18.067.362.000	18.067.362.000
Aset Tetap Lainnya	C.5	300.092.863	300.092.863
Akumulasi Penyusutan	C.6	(16.542.183.075)	(16.374.734.860)
<b>Jumlah Aset Tetap</b>		<b>20.883.386.421</b>	<b>21.345.117.236</b>
<b>ASET LAINNYA</b>			
Aset Tak Berwujud	C.7	1.663.672.500	1.663.672.500
Aset Lain-lain	C.8	115.056.727	825.904.271
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.9	(1.770.912.592)	(2.369.804.391)
<b>Jumlah Aset Lainnya</b>		<b>7.816.635</b>	<b>119.772.380</b>
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>21.106.832.676</b>	<b>22.133.819.704</b>
<b>KEWAJIBAN</b>			
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>			

Utang kepada Pihak Ketiga	C.10	276.913.478	271.111.066
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>276.913.478</b>	<b>271.111.066</b>
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas	C.11	20.829.919.198	21.862.708.638
<b>JUMLAH EKUITAS</b>		<b>20.829.919.198</b>	<b>21.862.708.638</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>		<b>21.106.832.676</b>	<b>22.133.819.704</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

### III. LAPORAN OPERASIONAL

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN OPERASIONAL**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

*(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>			
<b>PENDAPATAN</b>			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.514.098.492	4.329.920
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>3.514.098.492</b>	<b>4.329.920</b>
<b>BEBAN</b>			
Beban Pegawai	D.2	7.205.124.869	7.763.493.338
Beban Persediaan	D.3	466.462.329	378.429.736
Beban Barang dan Jasa	D.4	4.596.479.743	2.625.360.554
Beban Pemeliharaan	D.5	451.386.203	370.657.667
Beban Perjalanan Dinas	D.6	3.887.450.061	1.790.702.497
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	779.885.171	1.132.353.385
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>17.386.788.376</b>	<b>14.060.997.177</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>		<b>(13.872.689.884)</b>	<b>(14.056.667.257)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.8	8.866.970	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	115.311.656
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		36.097.698	0
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>		<b>(44.964.668)</b>	<b>115.311.656</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>		<b>(13.917.654.552)</b>	<b>(13.941.355.601)</b>

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

**IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**BPS Provinsi Gorontalo**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**  
**Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022**

*(Dalam Rupiah)*

<b>URAIAN</b>	<b>CATATAN</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>
Ekuitas awal	E.1	21.862.708.638	22.572.954.671
Surplus/defisit-LO	E.2	(13.917.654.552)	(13.941.355.601)
Transaksi Antar Entitas	E.4	12.884.865.112	13.231.109.568
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	13.549.990.254	13.561.321.069
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	(665.125.142)	(330.211.501)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(1.032.789.440)	(710.246.033)
Ekuitas Akhir	E.5	20.829.919.198	21.862.708.638

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Entitas dan **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Provinsi Gorontalo**

Rencana  
Strategis

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999. Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS. Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif. Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (stakeholders). Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:  
Visi BPS :

**"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"**

*("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")*

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;

2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Kualitas dari produk yang dihasilkannya (data statistik).
2. Kualitas dari pelayanan untuk mendiseminasi data statistik kepada penggunanya dengan dukungan dan peranan TIK.
3. Efektifitas di dalam melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan statistik.
4. Kualitas dari proses tata kelola (governance) di dalam organisasinya.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS). Program ini bertujuan untuk menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data. Untuk menyediakan data dan informasi statistik tersebut, BPS secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan dan pengembangan kegiatan pengumpulan, pengolahan, pengkajian dan analisis, serta diseminasi data dan informasi statistik.
2. Program Dukungan Manajemen BPS. Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk :
  1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;

2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah

Pendekatan  
Penyusunan  
Laporan  
Keuangan

### **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Provinsi Gorontalo. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Basis  
Akuntansi

### **A.3. Basis Akuntansi**

BPS Provinsi Gorontalo menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau

dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar  
Pengukuran

#### **A.4. Dasar Pengukuran**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Provinsi Gorontalo dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan  
Akuntansi

#### **A.5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam penyusunannya telah

diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Provinsi Gorontalo Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-  
LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan  
LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Provinsi Gorontalo adalah sebagai berikut:
  - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
  - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
  - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettoanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban **(4) Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset **(5) Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar **a. Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungannya adalah sebagai berikut:

*Tabel 1*  
*Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang*

<b>Kualitas Piutang</b>	<b>Uraian</b>	<b>Penyisihan</b>
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
  - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
  - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
  - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

## Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
  - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
  - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
  - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Pada Tahun 2017 dan 2018, Pemerintah melakukan penilaian kembali (revaluasi) berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah. Revaluasi dilakukan terhadap aset tetap berupa Tanah, Gedung dan Bangunan, serta Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada Kementerian Negara/Lembaga sesuai kodefikasi Barang Milik Negara yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2015. Pelaksanaan revaluasi dilakukan dengan pendekatan pasar, pendekatan biaya, dan / atau pendekatan pendapatan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penilaian dalam rangka revaluasi dilakukan dengan pendekatan data pasar, pendekatan biaya, dan/atau pendekatan pendapatan oleh Penilai Pemerintah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Revaluasi dilakukan pada tahun 2017 dan 2018.
- Nilai aset tetap hasil penilaian kembali menjadi nilai perolehan baru dan nilai akumulasi penyusutannya adalah nol. Dalam hal nilai aset tetap hasil revaluasi lebih tinggi dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai penambah ekuitas pada Laporan Keuangan. Namun, apabila nilai aset tetap

hasil revaluasi lebih rendah dari nilai buku sebelumnya maka selisih tersebut diakui sebagai pengurang ekuitas pada Laporan Keuangan.

- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan  
Aset Tetap

#### **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
  - Tanah
  - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
  - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 2*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap*

<b>Kelompok Aset Tetap</b>	<b>Masa Manfaat</b>
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang  
Jangka  
Panjang

**d. Piutang Jangka Panjang**

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas ) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya **e. Aset Lainnya**

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam

Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

*Tabel 3*  
*Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud*

<b>Kelompok Aset Tak Berwujud</b>	<b>Masa Manfaat (Tahun)</b>
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

**Kewajiban (6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
  - Kewajiban Jangka Pendek Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
  - Kewajiban Jangka Panjang Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh

tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

**(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

## **B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN**

Selama periode berjalan, BPS Provinsi Gorontalo telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

- Anggaran Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan nilai Rp8.857.000,- merupakan estimasi biaya pendapatan setelah adanya realisasi pendapatan satker tahun 2023. Tetapi anggaran ini tidak masuk pada DIPA maupun POK satker BPS Provinsi Gorontalo.
- Anggaran Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi senilai Rp3.506.730.000 merupakan anggaran kerjasama swakelola tipe II antara Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan pendataan lengkap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (PL-KUMKM) yang masuk pada pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan nomor kerjasama Nomor: 632/Kontrak/PPK/Dep.4/VIII/2023 dan Nomor: B-1308/7500/HK.610/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023
- Anggaran Belanja pada satker BPS Provinsi Gorontalo terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan total Rp13.829.375.000,- merupakan anggaran yang muncul pada DIPA awal satker kemudian dilakukan revisi anggaran sebanyak 23 kali baik DIPA maupun POK sehingga anggaran akhir menjadi Rp17.216.283.000.
- Anggaran Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan nilai Rp8.857.000,- merupakan estimasi biaya pendapatan setelah adanya realisasi pendapatan satker tahun 2023. Tetapi anggaran ini tidak masuk pada DIPA maupun POK satker BPS Provinsi Gorontalo.
- Anggaran Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi senilai Rp3.506.730.000 merupakan anggaran kerjasama swakelola

tipe II antara Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan pendataan lengkap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (PL-KUMKM) yang masuk pada pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan nomor kerjasama Nomor: 632/Kontrak/PPK/Dep.4/VIII/2023 dan Nomor: B-1308/7500/HK.610/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023

- Anggaran Belanja pada satker BPS Provinsi Gorontalo terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan total Rp13.829.375.000,- merupakan anggaran yang muncul pada DIPA awal satker kemudian dilakukan revisi anggaran sebanyak 23 kali baik DIPA maupun POK sehingga anggaran akhir menjadi Rp17.216.283.000.
- Anggaran Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan nilai Rp8.857.000,- merupakan estimasi biaya pendapatan setelah adanya realisasi pendapatan satker tahun 2023. Tetapi anggaran ini tidak masuk pada DIPA maupun POK satker BPS Provinsi Gorontalo.
- Anggaran Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi senilai Rp3.506.730.000 merupakan anggaran kerjasama swakelola tipe II antara Kementerian Koperasi dan UKM untuk kegiatan pendataan lengkap koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (PL-KUMKM) yang masuk pada pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dengan nomor kerjasama Nomor: 632/Kontrak/PPK/Dep.4/VIII/2023 dan Nomor: B-1308/7500/HK.610/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023
- Anggaran Belanja pada satker BPS Provinsi Gorontalo terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan belanja modal dengan total Rp13.829.375.000,- merupakan anggaran yang muncul pada DIPA awal satker kemudian dilakukan revisi anggaran sebanyak 23 kali baik DIPA maupun POK sehingga anggaran akhir menjadi Rp17.216.283.000.

Tabel 4  
Rincian Anggaran

Uraian	2023	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.857.000	8.857.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.506.730.000	3.506.730.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.515.587.000</b>	<b>3.515.587.000</b>
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	7.775.836.000	7.218.351.000
BELANJA BARANG	6.043.039.000	9.801.321.000
BELANJA MODAL	10.500.000	196.611.000
<b>Jumlah Belanja</b>	<b>13.829.375.000</b>	<b>17.216.283.000</b>

#### PENJELASAN ALASAN REVISI ANGGARAN TAHUN 2023

##### 1. Revisi DIPA I (28 Desember 2022)

Revisi DIPA I dilakukan sehubungan dengan adanya tindak lanjut atas Instruksi Menteri Keuangan RI Nomor: S-1040/MK.02/2022 perihal *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga TA 2023. Instruksi tersebut kemudian ditindaklanjuti dalam surat Kepala BPS RI Nomor: B-507/01000/PR.440/12/2022 Tanggal 14 Desember 2022 perihal Revisi Anggaran dalam rangka *Automatic Adjustment* TA 2023. Tindak lanjut dari surat tersebut meliputi pemblokiran *automatic adjustment* sebesar Rp541.953.000,- pada belanja pegawai di Program Dukman dan blokir sebesar Rp259.575.000,- pada belanja barang pada Program PPIS. Total blokir *automatic adjustment* sebesar Rp801.528.000,-. Revisi DIPA I ini tidak mengubah pagu anggaran, pagu tetap sebesar Rp13.829.375.000, -.

2. Revisi Satker I (20 Januari 2022)

Revisi Satker I ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan dan perjalanan dinas yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada BPS No. 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 dan Perka BPS No. 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp13.829.375.000, -.

3. Revisi DIPA II (30 Januari 2023)

Revisi DIPA II ini merupakan Revisi Kanwil dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk periode RPD Triwulan I sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0192/7500/PR.450/01/2023 Tanggal 30 Januari 2023. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.829.375.000, -.

4. Revisi DIPA III (27 Februari 2023)

Revisi DIPA III dilakukan sehubungan dengan tindak lanjut atas Surat Sestama BPS RI Nomor: B-235/02100/PR.400/02/2023 tanggal 10 Februari 2023 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023. Revisi tersebut untuk mengakomodir penyesuaian kegiatan dan anggaran pada kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS), Susenas, Regsosek dan Sensus Pertanian Tahun 2023. Pada revisi ini, perubahan anggaran tidak hanya pada pergeseran anggaran, namun juga terdapat perubahan blokir *automatic adjustment* pada Program PPIS yang menyebabkan perubahan jumlah blokir bertambah sebesar Rp54.708.000,- menjadi Rp314.283.000,-. Secara keseluruhan,

revisi ini menyebabkan penambahan anggaran di Program Dukman sebesar Rp4.016.000,- dan pengurangan anggaran pada Program PPIS sebesar Rp259.415.000,-. Sehingga secara total pagu anggaran berkurang sebesar Rp255.399.000,- atau total pagu menjadi sebesar Rp13.573.976.000, -.

5. Revisi Satker II (26 Maret 2023)

Revisi Satker II ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan biaya paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada BPS No. 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 dan Perka BPS No. 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.573.976.000, -.

6. Revisi Satker III (10 April 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada Perka BPS No. 124 dan Perka BPS No. 117. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp13.573.976.000, -.

7. Revisi DIPA IV (17 April 2023)

Revisi DIPA IV merupakan Revisi Kanwil yang rutin dilaksanakan dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan periode RPD triwulan II. Revisi ini sesuai dengan surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-0631/7500/PR.450/04/2023 Tanggal 14 April

2023. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, pagu tetap sebesar Rp13.573.976.000, -.

8. Revisi Satker IV (9 Mei 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada BPS No. 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 dan Perka BPS No. 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp13.573.976.000, -.

9. Revisi Satker V (9 Juni 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, biaya honor, pemeliharaan dan perjalanan dinas perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada BPS No. 124 dan BPS No. 117. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp13.573.976.000, -.

Revisi DIPA V (11 Juli 2023)

Revisi DIPA V ini merupakan tindak lanjut atas Surat Sestama BPS Nomor: B-981/02100/PR.440/06/2023 tanggal 21 Juni 2023 perihal Revisi Anggaran untuk Mengakomodir Penyesuaian Kegiatan Tahun 2023. Tindak lanjut dari surat tersebut adalah untuk mengakomodir penyesuaian kegiatan dan anggaran kegiatan EPSS di Program Dukman dan kegiatan Sensus Pertanian 2023 dan Desa Cantik di Program PPIS sesuai dengan dasar hitung yang tertuang pada surat di atas.

Pada revisi ini, BPS Provinsi Gorontalo mengikutsertakan revisi anggaran antar satker antara lain realokasi anggaran sebesar Rp65.000.000,- dari Satker BPS Provinsi Gorontalo ke Satker BPS Kota Gorontalo untuk memenuhi kekurangan biaya operasional kantor. Kedua, mengikutsertakan pemindahan anggaran kegiatan sesuai dengan lokasi sakter penyelenggaranya, antara lain memindahkan anggaran Pengolahan Sensus Pertanian Tahun 2023 sebesar 24.000.000,- dari Satker BPS Gorontalo Utara ke Satker BPS Prov. Gorontalo, serta realokasi anggaran Pendataan Lapangan Survei Pariwisata sebesar Rp10.205.000,- ke seluruh Satker BPS Kab/Kota se-Prov. Gorontalo sesuai dasar hitung alokasi sampel dari BPS RI.

Revisi DIPA ini juga mengikutsertakan revisi dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan periode RPD triwulan III. Secara keseluruhan, revisi ini tidak mengubah jumlah blokir, perubahan meliputi pengurangan anggaran pada Program Dukman sebesar Rp63.374.000,- dan Program PPIS bertambah sebesar Rp16.032.000,-. Sehingga secara total pagu anggaran berkurang sebesar Rp47.342.000,- atau total pagu menjadi sebesar Rp13.526.634.000, -.

#### 11. Revisi Satker VI (17 Juli 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada Perka BPS No. 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 dan Perka BPS No. 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp13.526.634.000, -.

#### 12. Revisi DIPA VI (17 Juli 2023)

Revisi DIPA VI dilakukan sehubungan dengan tindak lanjut atas Surat Sestama BPS RI Nomor: B-848/02000/PR.440/07/2023 Tanggal 11 Juli 2023 perihal Revisi Anggaran dalam rangka Penyesuaian Belanja Pegawai yang berasal dari blokir *Automatic Adjustment* TA 2023. Revisi ini bertujuan untuk menghapus anggaran pagu blokir *automatic adjustment* belanja pegawai pada Program Dukman sebesar Rp541.953.000,-. Secara total, revisi ini menyisakan blokir di belanja barang di Program PPIS sebesar Rp.314.283.000,-, dan total pagu anggaran berkurang menjadi Rp.12.984.681.000,-.

#### 13. Revisi Satker VII (21 Agustus 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada Perka BPS No.: 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 dan Perka BPS No.: 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp.12.984.681.000,-.

#### 14. Revisi DIPA VII (22 Agustus 2023)

Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sestama BPS RI Nomor: B-951/02000/PR.400/08/2023 Tanggal 7 Agustus 2023 untuk mengakomodir realokasi anggaran di Program Dukman antara lain pengurangan pagu anggaran belanja pegawai senilai Rp497.668.000,-, penambahan anggaran untuk kegiatan Pleno EPSS senilai Rp24.812.000,-, penambahan anggaran untuk pelaksanaan kampanye publik gerakan nasional BBI dan BBWI senilai

Rp285.000.000,-, dan penambahan belanja modal berupa pengadaan AC Casete sejumlah 6 unit senilai Rp165.111.000,-.

Pada Program PPIS, revisi ini menyebabkan penambahan anggaran untuk kegiatan verifikasi Data ST2023 senilai Rp408.035.000,-; dan penambahan anggaran kerja sama PNBP Pendataan Lengkap KUMKM TA 2023 senilai Rp3.261.258.000,-. Secara total revisi DIPA VII ini menyebabkan pagu bertambah Rp3.646.611.000,- menjadi Rp.16.631.229.000,-.

15. Revisi Satker VIII, IX dan X (11,19 dan 28 September 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada Perka BPS No. 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 serta Perka BPS No. 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Revisi kewenangan KPA ini tidak mengubah pagu anggaran, pagu tetap sebesar Rp.16.631.229.000,-.

16. Revisi DIPA VIII (6 Oktober 2023)

Revisi ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sestama BPS RI Nomor: B-1740/02100/PR.440/09/2023 Tanggal 22 September 2023 untuk mengakomodir penyesuaian anggaran pada Program Dukman selain operasional kegiatan dan Program PPIS. Revisi ini menyebabkan pengurangan pagu sebesar Rp41.000.000,- pada Program Dukman dan penyesuaian anggaran pada Program PPIS yaitu realokasi anggaran ST2023 dan penambahan anggaran belanja modal berupa Pengadaan Scanner sejumlah 1 unit senilai Rp21.000.000,-.

Selain realokasi anggaran diatas, BPS Provinsi Gorontalo juga mengikutsertakan realokasi anggaran kegiatan desa cantik ke Satker BPS Kab/Kota senilai Rp32.305.000,- serta revisi antar satker untuk memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai di BPS Provinsi Gorontalo yang dipenuhi dari anggaran 4 Satker Kab/Kota dengan total nilai Rp452.136.000,-. Sehingga secara total pagu anggaran bertambah sebesar Rp869.337.000,- atau total pagu menjadi sebesar Rp17.500.566.000,-.

#### 17. Revisi Satker XI (9 Oktober 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada Perka BPS No. 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 serta Perka BPS No. 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp17.500.566.000, -.

#### 18. Revisi DIPA IX (13 Oktober 2023)

Revisi ini merupakan Revisi Kewenangan Kanwil dalam rangka pemutakhiran POK dan Revisi Halaman III DIPA yang bertujuan untuk menyusun rencana penarikan dana per bulan untuk periode triwulan IV. Revisi ini sebagaimana tertuang dalam surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-1878/7500/PR.450/10/2023 tanggal 12 Oktober 2023. Revisi ini tidak mengubah besaran pagu maupun besaran blokir, sehingga pagu tetap sebesar Rp.17.500.566.000,-.

#### 19. Revisi DIPA X (21 Oktober 2023)

Revisi anggaran ini merupakan tindak lanjut dari Surat Sestama BPS Nomor: B-1179/02000/PR.440/10/2023 Tanggal 11 Oktober 2023 untuk mengakomodir Tindak Lanjut Penyelesaian Relaksasi Non Belanja Pegawai dari *Automatic Adjustment* Belanja K/L TA 2023. Penyesuaian anggaran pada revisi ini adalah penghapusan seluruh anggaran blokir *automatic adjustment*. Total blokir senilai Rp314.283.000,- pada Program PPIS telah dihapus, sehingga tidak ada lagi anggaran blokir pada pagu Satker BPS Provinsi Gorontalo. Revisi ini menyebabkan total pagu berkurang menjadi Rp.17.186.283.000,-.

#### 20. Revisi Satker XII XIII dan XIV (13 November 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting yang merupakan kewenangan KPA dengan tetap mengacu pada Perka BPS Nomor 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 dan Perka BPS Nomor 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Dalam revisi yang menjadi kewenangan KPA ini, tidak menyebabkan perubahan pagu anggaran, pagu tetap sebesar Rp17.186.283.000, -.

#### 21. Revisi DIPA XI (01 Desember 2023)

Revisi DIPA XI ini merupakan revisi anggaran antar satker kewenangan Kanwil DJPb melalui persetujuan Eselon I BPS. Revisi ini sebagaimana tertuang dalam Surat Kepala BPS Provinsi Gorontalo Nomor: B-1659/7505/PR.440/11/2023 tanggal 28 November 2023. Penyesuaian anggaran diperlukan dalam rangka memenuhi kekurangan anggaran belanja pegawai di Satker BPS Provinsi Gorontalo senilai Rp30.000.000,- yang dipenuhi dari anggaran Satker BPS Kab. Gorontalo Utara. Revisi ini menyebabkan total pagu bertambah menjadi Rp.17.216.283.000,-.

22. Revisi Satker XV XVI dan XVII (13, 15 dan 21 Desember 2023)

Revisi ini merupakan revisi penyesuaian POK kewenangan KPA. Revisi diperlukan dalam rangka realokasi penyesuaian belanja barang, pemeliharaan, perjalanan dinas dan paket meeting dalam rangka optimalisasi penyerapan anggaran TA 2023. Revisi dilakukan dengan tetap mengacu pada Perka BPS No. 124 tentang Pedoman Harga Kegiatan Statistik TA 2023 dan Perka BPS 117 SBML untuk Petugas Pendataan Pemeriksaan dan Pengolahan pada BPS. Dalam revisi kewenangan KPA ini tidak mengubah pagu anggaran, pagu tetap sebesar Rp17.216.283.000, -.

23. Revisi DIPA XII (27 Desember 2023)

Revisi ini adalah revisi dalam rangka pemutakhiran POK yang menjadi kewenangan KPA yang harus dilakukan di Kanwil DJPB setiap akhir tahun anggaran. Tujuannya untuk sinkronisasi data pada database SAKTI dan Omspan. Revisi ini berdasarkan Surat Kepala BPS Prov. Gorontalo Nomor: B-2494/7500/PR.440/12/2023 tanggal 27 Desember 2023. Tidak ada perubahan pagu, sehingga pagu tetap sebesar Rp.17.216.283.000,-

*Realisasi PNB* **B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**

*Rp3.514.098.492*

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.514.098.492 atau mencapai 99,96 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp3.515.587.000. Rincian Pendapatan BPS Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

Tabel 5

## Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	8.857.000	6.521.450	73,63
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.506.730.000	3.507.577.042	100,02
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.515.587.000</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>0</b>

Realisasi pendapatan pengelolaan BMN dengan nilai Rp6.521.450 merupakan pemanfaatan BMN berupa sewa rumah dinas eselon II dan III selama tahun 2023 sedangkan realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi sebesar Rp3.507.577.042 terdiri dari :

- PNBPN dari kerjasama swakelola tipe II antara Kemenkop dan UMK bersama dengan BPS Provinsi Gorontalo untuk kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2023 (PL-KUMKM) senilai Rp3.506.730.000
- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan yakni penjualan data mikro senilai Rp847.042

*Tabel 6*  
*Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 dan 31*  
*Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023(Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022(Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	6.521.450	4.224.700	54,36
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	3.507.577.042	105.220	3.333.464,95
Pendapatan Lain-Lain	0	102.797.179	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>107.127.099</b>	<b>3.180,31</b>

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 3.180,31 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2022.

Kenaikan pendapatan sangat tinggi pada periode ini baik dari pendapatan dari pengelolaan BMN yakni sewa rumah dinas selama tahun 2023 yang naik 54,36% kemudian Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang merupakan penunjang tertinggi kenaikan dari tahun sebelumnya yakni 3.333.464,98% berasal dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP) merupakan kerjasama Kemenkop dan UMK bersama BPS untuk PL-KUMKM sebesar Rp3.506.730.000 serta hasil penjualan data mikro oleh BPS Provinsi Gorontalo senilai Rp847.042.

Untuk periode ini tidak terdapat pendapatan lain-lain yang biasanya berasal dari pengembalian belanja yang tidak terdapat pada tahun 2023.

Realisasi Belanja  
Negara  
Rp17.064.088.746

## B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp17.064.088.746 atau 99,12 persen dari anggaran belanja sebesar Rp17.216.283.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 7*  
*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2023*

Uraian	2023		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	7.218.351.000	7.199.489.082	99,74
BELANJA BARANG	9.801.321.000	9.668.232.164	98,64
BELANJA MODAL	196.611.000	196.367.500	99,88
Jumlah Netto	17.216.283.000	17.064.088.746	99,12

Total realisasi anggaran tahun 2023 sebesar 99,12% yang telah memenuhi standar realisasi yang ditetapkan oleh BPS RI yakni 98%. Dengan rincian belanja pegawai dengan realisasi 99,74%, belanja barang 98,64% dan belanja modal 99,88%. Realisasi tersebut dari rupiah murni (RM) maupun PNBP.

*Tabel 8*  
*Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	7.201.679.254	7.887.375.526	(8,69)
BELANJA BARANG	9.668.232.164	5.837.686.830	65,62
BELANJA MODAL	196.367.500	34.822.500	463,91
Jumlah Bruto	17.066.278.918	13.759.884.856	24,03
Pengembalian Belanja	2.190.172	91.436.688	(97,60)
Jumlah	17.064.088.746	13.668.448.168	24,84

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 24,84 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2022.

Hal ini dikarenakan realisasi belanja barang dan belanja modal mengalami kenaikan. Belanja barang mengalami kenaikan dengan adanya penerimaan dana dari kerjasama kegiatan PL-KUMKM yang cukup besar, sedangkan belanja modal pengadaan peralatan dan mesin antara lain AC cassete, camera vicon, timbangan dan alat uji kadar air.

*Belanja Pegawai  
Rp7.199.489.082*

### **B.3 Belanja Pegawai**

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.199.489.082 dan Rp7.802.591.100. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 9  
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2023  
dan 31 Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	3.449.056.407	3.883.940.809	(11,20)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	19.745.080	0	0,00
Belanja Lembur	74.618.000	69.136.000	7,93
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	3.658.259.767	3.934.298.717	(7,02)
<b>Jumlah Bruto</b>	<b>7.201.679.254</b>	<b>7.887.375.526</b>	<b>(8,69)</b>
Pengembalian Belanja	2.190.172	84.784.426	(97,42)
<b>Jumlah</b>	<b>7.199.489.082</b>	<b>7.802.591.100</b>	<b>(7,73)</b>

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar (7,73) persen dari 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Belanja gaji dan tunjangan PNS yang mengalami penurunan 11,20% dikarenakan mutasi pegawai dari satker BPS Provinsi Gorontalo ke satker BPS lainnya sesuai dengan surat keputusan masing-masing.
- Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito yang mengalami penurunan 7,02% dikarenakan penyesuaian rate tunjangan kinerja pegawai sesuai dengan Perka BPS

Pengembalian belanja mengalami penurunan 97,42% dikarenakan tahun ini pengembalian hanya berasal dari kelebihan tunjangan fungsional yang telah dihentikan atau dialihkan ke fungsional umum. Sedangkan periode sebelumnya cukup tinggi yang berasal dari pengembalian tunjangan struktural pejabat yang diakihkan ke fungsional.

*Belanja Barang*  
Rp9.668.232.164

**B.4 Belanja Barang**

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp9.668.232.164 dan Rp5.831.034.568.

*Tabel 10*  
*Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Barang Operasional	384.661.613	869.659.486	(55,77)
Belanja Barang Non Operasional	2.777.101.929	1.174.285.704	136,49
Belanja Barang Persediaan	741.866.782	1.047.975.425	(29,21)
Belanja Jasa	1.434.549.576	587.642.239	144,12
Belanja Pemeliharaan	442.602.203	367.361.479	20,48

Belanja Perjalanan Dalam Negeri	3.887.450.061	1.790.762.497	117,08
Jumlah Bruto	9.668.232.164	5.837.686.830	65,62
Pengembalian Belanja	0	6.652.262	(100,00)
Jumlah	9.668.232.164	5.831.034.568	65,81

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023 mengalami kenaikan sebesar 65,81 persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2022.

Pada tahun 2023 Badan Pusat Statistik (BPS) melakukan 3 kegiatan besar yakni Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PL-KUMKM) tahun 2023 yang semuanya kegiatan ini berdampak pada kenaikan belanja barang seperti belanja barang non operasional berupa honor tim kegiatan, belanja jasa meliputi jasa profesi maupun jasa lainnya yang berhubungan dengan kegiatan sensus/survei. Sedangkan belanja perjalanan dalam negeri termasuk biaya paket meeting pelatihan petugas survei dan sensus serta rapat koordinasi yang melibatkan seluruh Kab/Kota yang terlibat. Selain itu, berasal dari perjalanan dinas pengawasan/supervisi ke lapangan dalam rangka pengecekan pendataan di lapangan.

*Belanja Modal  
Rp196.367.500*

#### **B.5 Belanja Modal**

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp196.367.500 dan Rp34.822.500. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

*Tabel 11  
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.367.500	34.822.500	463,91

Jumlah Bruto	196.367.500	34.822.500	463,91
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>196.367.500</b>	<b>34.822.500</b>	<b>463,91</b>

Realisasi Belanja Modal mengalami kenaikan pada 31 Desember 2023 sebesar 463,91 persen dibandingkan 31 Desember 2022 disebabkan oleh

Belanja modal pada tahun ini hanya berasal dari peralatan dan mesin yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun 2023 belanja peralatan dan mesin berupa pengadaan camera vicon, AC cassete, alat uji kadar air dan alat timbangan yang digunakan untuk keperluan lapangan. Sedangkan pengadaan belanja modal tahun 2022 hanya pengadaan peralatan dan mesin sebagai penunjang kegiatan lapangan.

Pada tahun ini tidak terdapat pengadaan konstruksi sehingga tidak adanya pembayaran per termin. Semua pengadaan modal tahun ini melalui epurchasing sehingga langsung direalisasikan.

#### **B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp196.367.500 dan Rp34.822.500.

*Tabel 12*  
*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

<b>Uraian Jenis Belanja</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>Realisasi 31 Desember 2022 (Rp)</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	196.367.500	34.822.500	463,91
Jumlah Bruto	196.367.500	34.822.500	463,91
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>196.367.500</b>	<b>34.822.500</b>	<b>463,91</b>

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2023, mengalami kenaikan sebesar 463,91 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2022 sebesar Rp34.822.500.

Tahun 2023 pengadaan peralatan dan mesin cukup besar senilai Rp196.367.500 dengan rincian :

- Pengadaan AC Casete Rp154.800.000
- Pengadaan Camera Vicon Rp10.100.000
- Alat uji kadar air, ayakan broken/menir dan timbangan Rp10.467.500
- Scanner Rp21.000.000

Tahun 2022 senilai Rp34.822.500 merupakan pengadaan peralatan dan mesin sebagai penunjang kegiatan lapangan berupa Pengadaan alat uji kualitas beras dan Pengadaan alat uji kadar air (moisture tester).

## C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

*Persediaan*  
*Rp215.629.620*

### C.1 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp215.629.620 dan Rp668.930.088. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 13*  
*Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Barang Konsumsi	215.552.720	660.069.188
Bahan untuk Pemeliharaan	76.900	8.860.900
<b>Jumlah</b>	<b>215.629.620</b>	<b>668.930.088</b>

Barang Konsumsi dengan nilai Rp215.552.720 merupakan kuesioner dan buku pedoman survei yang telah dicetak pada tahun 2023 tetapi akan digunakan untuk pendataan tahun 2024 selain itu, cetakan hasil publikasi yang disimpan pada perpustakaan BPS Provinsi Gorontalo.

Barang untuk pemeliharaan senilai Rp76.900 merupakan bahan disinfektan germ clear 1L.

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2023 dijelaskan sebagai berikut :

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>668.930.088</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian	741.866.782
Transfer Masuk	28.696.179
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>770.562.961</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Habis Pakai	(475.246.329)

Transfer Keluar	(712.519.402)
Usang	(36.097.698)
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(1.223.863.429)</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>(453.300.468)</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>215.629.620</b>

Mutasi tambah berasal dari pembelian ATK dan komputer supplies serta pengadaan pencetakan kuesioner dan buku pedoman survei penunjang kegiatan lapangan.

Transfer masuk persediaan berasal dari BPS RI berupa kuesioner, buku pedoman serta dokumen pencacahan untuk menunjang kegiatan perkantoran maupun lapangan dalam pelaksanaan survei di BPS Provinsi maupun BPS Kab/Kota.

Mutasi kurang habis pakai merupakan penggunaan ATK dan komputer supplies yang digunakan untuk menunjang kegiatan perkantoran. Selain itu kuesioner dan dokumen untuk penunjang kegiatan lapangan diserahkan kepada pelaku survei di lapangan. Transfer keluar merupakan transfer perlengkapan lapangan dari BPS Provinsi ke BPS Kab/Kota berupa kuesioner, buku pedoman dan bahan kegiatan publisitas sensus pertanian 2023. Selain itu, adanya transfer alat tulis lainnya untuk kegiatan sensus pertanian tahun 2023.

*Tanah*  
*Rp4.861.957.000*

### **C.2 Tanah**

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.861.957.000 dan Rp4.861.957.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>4.861.957.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	

<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<u>0</u>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<u>0</u>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>4.861.957.000</b>

Aset berupa Tanah yang dikuasai BPS Provinsi Gorontalo yaitu terletak di Kota Gorontalo dan Kab. Bone Bolango dengan rincian :

- Luas Tanah Bangunan Gedung Kantor adalah 2,382 M2 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon II adalah 392 M2 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.
- Luas Tanah Rumah Jabatan Eselon III adalah 2.050 M2 terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kota Utara Kota Gorontalo.

Sampai dengan periode 31 Desember 2023 tidak ada penambahan maupun pengurangan nilai tanah pada satker BPS Provinsi Gorontalo karena revaluasi Barang Milik Negara (BMN) berupa tanah oleh KPKNL dilaksanakan pada tahun 2017. Semua tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. Tidak adanya mutasi tanah pada periode ini sedangkan segala permasalahan baik sengketa, bukti kepemilikan, dikuasai pihak lain maupun pengentian dari penggunaan tidak terdapat pada periode ini.

*Peralatan dan Mesin  
Rp14.196.157.633*

### **C.3 Peralatan dan Mesin**

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp14.196.157.633 dan Rp14.490.440.233. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>14.490.440.233</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Pembelian	196.367.500
Transfer Masuk	195.000.000

<b>Total Mutasi Tambah</b>	<b>391.367.500</b>
<b>:</b>	
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Transfer Keluar	(584.974.100)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(100.676.000)
<b>Total Mutasi Kurang</b>	<b>(685.650.100)</b>
<b>:</b>	
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>(294.282.600)</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>14.196.157.633</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>(13.763.658.946)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>432.498.687</b>

Mutasi tambah peralatan dan mesin dari pembelian senilai Rp196.367.500 dengan rincian :

- Pengadaan AC Casete Rp154.800.000
- Pengadaan Camera Vicon Rp10.100.000
- Alat uji kadar air, ayakan broken/menir dan timbangan Rp10.467.500
- Scanner Rp21.000.000

Mutasi tambah peralatan dan mesin dari transfer masuk senilai Rp195.000.000 berupa 1 unit kendaraan dinas roda-4 dari Badan Pusat Statistik (BPS) pusat.

Mutasi kurang berasal dari transfer keluar peralatan dan mesin senilai Rp584.974.100 berupa :

- 1 unit kendaraan dinas roda-4 ke BPS Kab. Bone Bolango Rp108.000.000
- 2 unit kendaraan dinas roda-2 ke BPS Kab. Pohuwato Rp30.060.000

- 1 unit kendaraan dinas roda-4 ke BPS Kab. Gorontalo Rp110.850.000
- 1 timbangan elektrik ke BPS Kab. Pohuwato Rp256.500
- 1 timbangan elektrik, 1 alat pengukur air, 1 unun alat penampi ke BPS Kab. Pohuwato dengan total Rp10.724.000
- 1 unit kendaraan dinas roda-4 ke BPS Kab. Pohuwato Rp162.798.300
- 1 unit kendaraan dinas roda-4 ke BPS Kab. Boalemo Rp162.798.300

Penghentian aset dari penggunaan senilai Rp100.676.000 berupa 1 unit kendaraan dinas roda-4 dan 1 unit kendaraan dinas roda-2.

*Gedung dan  
Bangunan  
Rp18.067.362.000*

#### **C.4 Gedung dan Bangunan**

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp18.067.362.000 dan Rp18.067.362.000. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>18.067.362.000</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>18.067.362.000</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>(2.778.524.129)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>15.288.837.871</b>

Sampai dengan periode 31 Desember 2022 tidak terdapat mutasi tambah atau mutasi kurang terhadap Aset Gedung dan Bangunan pada satker BPS Provinsi Gorontalo, hal ini dikarenakan tidak adanya pembangunan maupun pengembangan terhadap Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo.

Jenis Aset Gedung dan Bangunan milik BPS Provinsi Gorontalo berupa :

- Gedung Kantor 1 unit yang luasnya 1,735 M2 dengan 4 Lantai senilai Rp16.404.061.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Kabila Kab. Bone Bolango.
- Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen sebanyak 1 unit dengan luas 120 M2 dengan 1 Lantai senilai Rp.399.242.000 yang terletak di Jl. Brigjen Piola Isa, Kec. Kota Utara Kota Gorontalo, dan
- Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen sebanyak 6 unit dengan luas masing-masing per unit adalah 70 M 2 dengan 1 lantai senilai Rp.953.676.000 yang terletak di Jl. Prof. Dr. Aloei Saboe Kec. Wongkaditi Kec. Kota Utara.

Semua Aset tersebut sudah bersertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia c.q. Badan Pusat Statistik Republik Indonesia.

*Aset Tetap Lainnya  
Rp300.092.863*

#### **C.5 Aset Tetap Lainnya**

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp300.092.863 dan Rp300.092.863. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2023 disajikan pada tabel berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>300.092.863</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	

<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2023</b>	<b>300.092.863</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>0</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>300.092.863</b>

Tidak terdapat mutasi tambah pada aset tetap lainnya pada satker BPS Provinsi Gorontalo sehingga nilai aset tahun 2023 tidak ada perubahan dari tahun 2022 dengan nilai Rp300.092.863.

*Akumulasi  
Penyusutan Aset  
Tetap  
Rp16.542.183.075*

#### **C.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp16.542.183.075 dan Rp16.374.734.860. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 14  
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2023*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan</b>	<b>Nilai Buku</b>
Peralatan dan Mesin	14.196.157.633	13.763.658.946	432.498.687
Gedung dan Bangunan	18.067.362.000	2.778.524.129	15.288.837.871
Aset Tetap Lainnya	300.092.863	0	300.092.863
<b>Jumlah</b>	<b>32.563.612.496</b>	<b>16.542.183.075</b>	<b>16.021.429.421</b>

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Aset Tak Berwujud*    **C.7 Aset Tak Berwujud**  
*Rp1.663.672.500*

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp1.663.672.500 dan Rp1.663.672.500. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15*  
*Rincian Aset Tak berwujud 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai Perolehan</b>
Software	1.614.128.500
Lisensi	49.544.000
<b>Jumlah</b>	<b>1.663.672.500</b>

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>1.663.672.500</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>0</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>0</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>0</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>1.663.672.500</b>
<b>Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>(1.656.240.900)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>7.431.600</b>

Sesuai rincian diatas bahwa tidak ada perubahan nilai perolehan untuk aset tak berwujud pada pelaporan periode tahun ini dikarenakan tidak adanya

penambahan maupun pengurangan pada periode ini sehingga nilai perolehan masih sama dengan periode sebelumnya.

*Aset Lain-lain*  
*Rp115.056.727*

#### **C.8 Aset Lain-lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah Rp115.056.727 dan Rp825.904.271. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2022</b>	<b>825.904.271</b>
<b>Mutasi Tambah :</b>	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	100.676.000
<b>Total Mutasi Tambah :</b>	<b>100.676.000</b>
<b>Mutasi Kurang :</b>	
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(811.523.544)
<b>Total Mutasi Kurang :</b>	<b>(811.523.544)</b>
<b>Kenaikan(Penurunan)</b>	<b>(710.847.544)</b>
<b>Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023</b>	<b>115.056.727</b>
<b>Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>(114.671.692)</b>
<b>Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2023</b>	<b>385.035</b>

- Mutasi tambah berasal dari penghentian aset dari penggunaan senilai Rp100.676.000 berupa 1 unit kendaraan dinas roda-4 dan 1 unit kendaraan dinas roda-2.
- Mutasi kurang berasal dari Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp811.523.544 berupa kendaraan dinas roda-2 dan kendaraan dinas roda-4 yang akan dihapuskan mengikuti

peraturan pemerintah terkait aset kendaraan dinas yang dimiliki oleh satker sesuai dengan jabatan struktural yang dimiliki sedangkan satker BPS Provinsi Gorontalo telah mengalihkan seluruh jabatan ke fungsional.

Mutasi kurang berasal dari Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan senilai Rp811.523.544 berupa kendaraan dinas roda-2 dan kendaraan

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

*Akumulasi  
Penyusutan dan  
Amortisasi Aset  
Lainnya  
Rp1.770.912.592*

#### **C.9 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya**

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing Rp1.770.912.592 dan Rp2.369.804.391. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 16  
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

<b>Aset Tetap</b>	<b>Nilai Perolehan</b>	<b>Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi</b>	<b>Nilai Buku</b>
Software	1.614.128.500	1.614.128.500	0
Lisensi	49.544.000	42.112.400	7.431.600
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	115.056.727	114.671.692	385.035
<b>Jumlah</b>	<b>1.778.729.227</b>	<b>1.770.912.592</b>	<b>7.816.635</b>

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Utang kepada Pihak  
Ketiga  
Rp276.913.478

#### C.10 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 masing-masing sebesar Rp276.913.478 dan Rp271.111.066. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Provinsi Gorontalo per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 17  
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2023 dan 2022

Jenis	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	275.970.153	270.334.366
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	943.325	776.700
Jumlah	276.913.478	271.111.066

Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar pada tahun 2023 sebesar Rp276.913.478 terdiri dari :

- Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember 2023 senilai Rp267.321.894
- Tunjangan Kinerja Pegawai susulan bulan Desember 2023 senilai Rp.3.676.682
- Gaji susulan bulan Desember 2023 senilai Rp4.342.577
- Uang makan susulan bulan Desember 2023 senilai Rp.629.000

Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar pada tahun 2023 senilai Rp943.225 merupakan langganan air bulan desember 2023.

Seluruh tagihan pada tahun 2023 telah dibayarkan dan diselesaikan pada bulan januari 2024 sesuai peruntukkan masing-masing.

*Ekuitas*  
*Rp20.829.919.198*

### **C.11 Ekuitas**

Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.829.919.198 dan Rp21.862.708.638. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

#### **Rincian Ekuitas per 31 Desember 2022 tersaji pada tabel ini :**

Jumlah Aset	Rp21,106,832,676
Kewajiban	(Rp276,913,478)
<b>Saldo Nilai Ekuitas</b>	<b>Rp20,829,919,198</b>

*Pendapatan PNBP  
Rp3.514.098.492*

## **D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**

### **D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.514.098.492 dan Rp4.329.920. Pendapatan tersebut terdiri dari:

*Tabel 18  
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2023 dan  
31 Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>Naik (Turun) %</b>
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.521.450	4.224.700	54,36
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	3.506.730.000	0	0,00
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	847.042	105.220	705,02
<b>Jumlah</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>4.329.920</b>	<b>81.058,51</b>

- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan merupakan pendapatan pengelolaan BMN dengan nilai Rp6.521.450 berupa sewa rumah dinas eselon II dan III selama tahun 2023.
- Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan merupakan PNBP dari kerjasama swakelola tipe II antara Kemenkop dan UMK bersama dengan BPS Provinsi Gorontalo untuk kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah tahun 2023 (PL-KUMKM) senilai Rp3.506.730.000
- Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan yakni penjualan data mikro senilai Rp847.042

*Tabel 19*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak*  
*Sampai 31 Desember 2023*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	6.521.450	6.521.450	0
Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	3.506.730.000	3.506.730.000	0
Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	847.042	847.042	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>3.514.098.492</b>	<b>0</b>

Tidak adanya selisih antara Nilai LO dan LRA pada pendapatan PNPB tahun 2023.

*Beban Pegawai*     **D.2 Beban Pegawai**  
*Rp7.205.124.869*

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp7.205.124.869 dan Rp7.763.493.338. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 20*  
*Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun) %
Beban Gaji Pokok PNS	2.342.410.367	2.443.488.570	(4,14)
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.326	30.994	23,66
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	143.256.610	140.135.180	2,23
Beban Tunj. Anak PNS	38.245.590	41.429.258	(7,68)
Beban Tunj. Struktural PNS	63.140.000	47.480.000	32,98
Beban Tunj. Fungsional PNS	383.074.000	560.332.000	(31,63)
Beban Tunj. PPh PNS	10.613.659	22.421.871	(52,66)
Beban Tunj. Beras PNS	119.637.840	122.607.060	(2,42)

Beban Uang Makan PNS	317.379.000	371.414.000	(14,55)
Beban Tunjangan Umum PNS	33.919.870	49.940.000	(32,08)
Beban Gaji Pokok PPPK	14.832.500	0	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	480	0	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.700.000	0	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	362.100	0	0,00
Beban Uang Makan PPPK	1.850.000	0	0,00
Beban Uang Lembur	74.618.000	69.136.000	7,93
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.645.928.583	3.895.078.405	(6,40)
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13.117.944	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>7.205.124.869</b>	<b>7.763.493.338</b>	<b>(7,19)</b>

Beban belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami penurunan sebesar 7,19% dibandingkan periode 31 Desember 2022. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

- Beberapa pegawai mengalami mutasi ke satker lain sehingga berpengaruh pada pengurangan total gaji per bulan dan mempengaruhi beban tunjangan yang melekat pada gaji pokok.
- Tunjangan kinerja mengalami penyesuaian rate atau satuan per bulan disesuaikan dengan Perka BPS yang berdampak pada beberapa pegawai.

*Tabel 21*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31*  
*Desember 2023*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	2.342.410.367	2.338.190.340	4.220.027
Beban Pembulatan Gaji PNS	38.326	38.326	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	143.256.610	143.256.610	0
Beban Tunj. Anak PNS	38.245.590	38.245.590	0
Beban Tunj. Struktural PNS	63.140.000	63.140.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	383.074.000	383.074.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	10.613.659	10.613.659	0
Beban Tunj. Beras PNS	119.637.840	119.637.840	0
Beban Uang Makan PNS	317.379.000	316.750.000	629.000
Beban Tunjangan Umum PNS	33.919.870	33.919.870	0
Beban Gaji Pokok PPPK	14.832.500	14.832.500	0

Beban Pembulatan Gaji PPPK	480	480	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2.700.000	2.700.000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	362.100	362.100	0
Beban Uang Makan PPPK	1.850.000	1.850.000	0
Beban Uang Lembur	74.618.000	74.618.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	3.645.928.583	3.645.141.823	786.760
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13.117.944	13.117.944	0
<b>Jumlah</b>	<b>7.205.124.869</b>	<b>7.199.489.082</b>	<b>5.635.787</b>

Terdapat Selisih Beban Pegawai periode 31 Desember 2023 sebesar Rp 5.635.787 yang berasal dari :

- Beban Gaji Pokok PNS merupakan gaji susulan pegawai pindahan bulan desember 2023 yang dibayarkan pada januari 2024 setelah menerima SKPP yang disetujui oleh KPPN.
- Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan) merupakan Tunjangan Kinerja Pegawai bulan Desember yang dibayarkan Periode Januari tahun berikutnya.

*Beban Persediaan* **D.3 Beban Persediaan**  
*Rp466.462.329*

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp466.462.329 dan Rp378.429.736. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

Kenaikan beban persediaan pada periode ini dikarenakan bertambahnya volume kegiatan lapangan yang melibatkan belanja persediaan seperti kuesioner dan buku pedoman. Kegiatan tahun 2023 berupa Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta Pendataan

Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM) yang memerlukan persediaan yang cukup besar dibanding kegiatan tahun sebelumnya.

*Tabel 22*  
*Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	466.462.329	378.429.736	23,26
<b>Jumlah</b>	<b>466.462.329</b>	<b>378.429.736</b>	<b>23,26</b>

*Beban Barang dan Jasa*

*Rp4.596.479.743*

**D.4 Beban Barang dan Jasa**

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp4.596.479.743 dan Rp2.625.360.554. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Tabel 23*  
*Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun) %
Beban Keperluan Perkantoran	255.602.613	724.794.990	(64,73)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	3.778.000	(100,00)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124.380.000	130.977.500	(5,04)
Beban Barang Operasional Lainnya	4.500.000	0	0,00
Beban Barang Operasional -	0	3.756.746	(100,00)

Penanganan Pandemi COVID-19			
Beban Bahan	419.926.834	597.683.104	(29,74)
Beban Honor Output Kegiatan	2.318.765.880	558.980.000	314,82
Beban Barang Non Operasional Lainnya	31.031.415	7.187.000	331,77
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	10.435.600	(100,00)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7.377.800	0	0,00
Beban Langganan Listrik	267.655.222	258.604.137	3,50
Beban Langganan Telepon	2.852.219	2.477.142	15,14
Beban Langganan Air	7.256.600	10.506.335	(30,93)
Beban Sewa	17.982.000	130.500.000	(86,22)
Beban Jasa Profesi	73.100.000	60.300.000	21,23
Beban Jasa Lainnya	1.066.049.160	119.035.000	795,58
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	6.345.000	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>4.596.479.743</b>	<b>2.625.360.554</b>	<b>75,08</b>

Beban barang dan jasa mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya senilai 75,08% dikarenakan pada periode ini terdapat kegiatan besar berupa Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) serta Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM).

Rangkaian kegiatan ini mempengaruhi hampir seluruh kegiatan belanja barang dan jasa baik beban honor output kegiatan yang dibayarkan pada seluruh petugas sensus, beban barang non operasional lainnya serta beban jasa lainnya.

*Tabel 24*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31*  
*Desember 2023*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	255.602.613	255.781.613	(179.000)
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	0	0	0
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124.380.000	124.380.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	4.500.000	4.500.000	0
Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Bahan	419.926.834	419.926.834	0
Beban Honor Output Kegiatan	2.318.765.880	2.318.765.880	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	31.031.415	31.031.415	0
Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7.377.800	7.377.800	0
Beban Langganan Listrik	267.655.222	267.655.222	0
Beban Langganan Telepon	2.852.219	2.852.219	0
Beban Langganan Air	7.256.600	6.910.975	345.625
Beban Sewa	17.982.000	17.982.000	0
Beban Jasa Profesi	73.100.000	73.100.000	0
Beban Jasa Lainnya	1.066.049.160	1.066.049.160	0
Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	0	0	0
<b>Jumlah</b>	<b>4.596.479.743</b>	<b>4.596.313.118</b>	<b>166.625</b>

Selisih nilai LRA dan nilai LO pada beban barang dan jasa terdapat pada :

- Beban keperluan perkantoran senilai (Rp179.000) yang merupakan belanja tagihan langganan WA blast tahun sebelumnya yang dibayarkan tahun ini yakni bulan Desember 2022 dibayarkan Januari 2023

- Selisih Nilai LO dan LRA muncul pada beban langganan air pada periode sebelumnya yang direalisasikan pada periode selanjutnya, misalnya penggunaan langganan air sudah digunakan di bulan desember tetapi dibayarkan di bulan januari berikutnya. Berikut simulasi perhitungan nilai Rp345.625 didapatkan dari :

Langganan Air Desember 2023 dibayarkan Januari 2024	Rp943.325
Langganan Air Desember 2022 dibayarkan Januari 2023	(Rp597.700)
<b>JUMLAH</b>	<b>Rp345.625</b>

*Beban  
Pemeliharaan  
Rp451.386.203*

#### **D.5 Beban Pemeliharaan**

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp451.386.203 dan Rp370.657.667. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 25  
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023 dan 31  
Desember 2022*

<b>Uraian</b>	<b>31 Desember 2023</b>	<b>31 Desember 2022</b>	<b>Naik(Turun) %</b>
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.073.200	63.120.050	82,31
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	327.529.003	304.180.417	7,68
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8.784.000	3.357.200	161,65
<b>Jumlah</b>	<b>451.386.203</b>	<b>370.657.667</b>	<b>21,78</b>

Kenaikan beban pemeliharaan baik untuk pemeliharaan gedung maupun peralatan dan mesin mengalami kenaikan dibanding periode sebelumnya dikarenakan pada periode ini adanya perbaikan gedung dan lift gedung yang mengeluarkan anggaran yang tidak dilakukan pada periode sebelumnya. Selain

itu, perbaikan peralatan dan mesin seperti AC, UPS dan komputer dilakukan periode ini untuk kelancaran kegiatan perkantoran.

*Tabel 26*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2023*

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115.073.200	115.073.200	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	327.529.003	327.529.003	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8.784.000	0	8.784.000
<b>Jumlah</b>	451.386.203	442.602.203	8.784.000

Beban pemeliharaan senilai Rp8.784.000 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

*Beban Perjalanan Dinas*  
*Rp3.887.450.061*

#### **D.6 Beban Perjalanan Dinas**

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp3.887.450.061 dan Rp1.790.702.497. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

*Tabel 27*  
*Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Perjalanan Biasa	757.806.630	694.480.778	9,12
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.727.000	22.950.000	225,61

Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.595.672.361	820.140.000	216,49
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	459.244.070	253.131.719	81,42
<b>Jumlah</b>	<b>3.887.450.061</b>	<b>1.790.702.497</b>	<b>117,09</b>

Kenaikan yang cukup tinggi dari beban perjalanan dinas pada periode 31 Desember 2023 merupakan perjalanan dinas dalam dan luar kota serta paket meeting dalam kota maupun luar kota yang dilakukan untuk menunjang kegiatan teknis maupun administrasi. Adanya kegiatan pelatihan petugas, pengawasan lapangan, rapat koordinasi pada Sensus Pertanian 2023 (ST2023), Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) dan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil (PL-KUMKM) tahun 2023 yang dilakukan secara tatap muka sehingga kenaikan biaya perjalanan dinas berdampak pada realisasi anggaran yang cukup tinggi dibanding tahun sebelumnya.

*Tabel 28*  
*Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2023*

<b>Uraian</b>	<b>Nilai LO</b>	<b>Nilai LRA</b>	<b>Selisih</b>
Beban Perjalanan Biasa	757.806.630	757.806.630	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74.727.000	74.727.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.595.672.361	2.595.672.361	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	459.244.070	459.244.070	0
<b>Jumlah</b>	<b>3.887.450.061</b>	<b>3.887.450.061</b>	<b>0</b>

Pada periode ini tidak ada selisih antara nilai LO dan nilai LRA beban perjalanan dinas.

*Beban Penyusutan dan Amortisasi Rp779.885.171*

#### **D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp779.885.171 dan Rp1.132.353.385. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi

sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

*Tabel 29*  
*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik (Turun) %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	282.789.348	535.373.726	(47,18)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	394.007.048	394.007.048	0,00
Beban Amortisasi Software	98.134.375	196.268.750	(50,00)
Beban Amortisasi Lisensi	4.954.400	4.954.400	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	0	1.749.461	(100,00)
<b>Jumlah</b>	<b>779.885.171</b>	<b>1.132.353.385</b>	<b>(31,13)</b>

*Defisit dari Kegiatan Non Operasional*  
*Rp44.964.668*

**D.8 Kegiatan Non Operasional**  
Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

*Tabel 30*  
*Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022*

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik(Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			

Beban Kerugian Pelepasan Aset	8.866.970	0	0,00
<b>Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	102.797.179	(100,00)
Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	0	12.514.477	(100,00)
<b>Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya</b>			
Beban Persediaan Rusak/Usang	36.097.698	0	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(44.964.668)</b>	<b>115.311.656</b>	<b>(138,99)</b>

Penurunan atas beban dan pendapatan kegiatan non operasional dibandingkan tahun anggaran sebelumnya dikarenakan pada tahun ini tidak terdapat penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu yakni kelebihan selisih pembayaran tunjangan struktural pegawai yang telah disesuaikan terhadap jabatan fungsional dan telah memperoleh tunjangan fungsional.

Untuk tahun 2023 berasal dari beban kerugian pelepasan aset serta beban persediaan rusak atau usang.

## **E.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

*Ekuitas Awal*  
*Rp21.862.708.638*

### **E.1 Ekuitas Awal**

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 dan 1 Januari 2022 adalah masing-masing sebesar Rp21.862.708.638 dan Rp22.572.954.671.

*Defisit LO*  
*Rp13.917.654.552*

### **E.2 Surplus (Defisit) LO**

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp13.917.654.552 dan Rp13.941.355.601. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

*Transaksi Antar Entitas*  
*Rp12.884.865.112*

### **E.4 Transaksi Antar Entitas**

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp12.884.865.112 dan Rp13.231.109.568. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

*Tabel 31*  
*Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas*

<b>Jenis</b>	<b>31 Desember 2023 (Rp)</b>	<b>31 Desember 2022 (Rp)</b>
Ditagihkan ke Entitas Lain	17.064.088.746	13.668.448.168
Diterima dari Entitas Lain	(3.514.098.492)	(107.127.099)
Transfer Keluar	(721.678.464)	(584.032.283)
Transfer Masuk	56.553.322	253.820.782
<b>Jumlah</b>	<b>12.884.865.112</b>	<b>13.231.109.568</b>

Transaksi antar entitas periode ini pada satker BPS Provinsi Gorontalo meliputi :

- Ditagihkan ke Entitas lain yakni realisasi pada entitas itu sendiri dalam hal ini satker BPS Provinsi Gorontalo yang ditagihkan atau

dimintakan ke BUN sebagai entitas lainnya dalam bentuk pengajuan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

- Diterima dari Entitas lain merupakan pendapatan yang diterima oleh satker BPS Provinsi Gorontalo dari pihak lain berupa PNBK kerjasama swakelola tipe II dengan Kemenkop untuk kegiatan pendataan lengkap koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta sewa rumah negara yang dibayarkan oleh penghuni rumah dinas.
- Transfer Keluar merupakan pengiriman barang konsumsi berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas roda-2 dan roda-4 serta alat untuk keperluan pendataan di lapangan ke satker BPS Kab/Kota se Provinsi Gorontalo.

Transfer Masuk merupakan penerimaan barang konsumsi, peralatan dan mesin serta software dari satker Sestama berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin.

#### **E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)**

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2023, DDEL sebesar minus Rp3.514.098.492 sedangkan DKEL sebesar Rp17.064.088.746.

Diterima dari Entitas lain senilai Rp3.514.098.492 merupakan pendapatan yang diterima oleh satker BPS Provinsi Gorontalo dari pihak lain berupa :

- PNBK dari kerjasama swakelola tipe II antara Kemenkop dan BPS Provinsi Gorontalo senilai Rp3.506.730.000
- Hasil penjualan data mikro ke masyarakat senilai Rp847.042
- Sewa rumah negara yang dibayarkan oleh penghuni rumah dinas senilai Rp6.521.450

Ditagihkan ke Entitas lain sebesar Rp17.064.088.746 merupakan realisasi pada entitas itu sendiri dalam hal ini satker BPS Provinsi Gorontalo yang

ditagihkan atau dimintakan ke BUN sebagai entitas lainnya dalam bentuk pengajuan pembayaran kegiatan yang telah dilaksanakan.

#### **E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar**

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp56.553.322. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp721.678.464.

*Tabel 32  
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2023*

<b>Entitas Asal</b>	<b>Jenis</b>	<b>Aset Diterima</b>	<b>Akumulasi Transaksional</b>	<b>Nilai Buku Aset (Rp)</b>
Jumlah		0	0	0

Transfer Masuk merupakan penerimaan barang konsumsi, peralatan dan mesin serta software dari satker Sestama berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin.

*Tabel 33  
Rincian Transfer Keluar Per 31 Desember 2023*

<b>Entitas Tujuan</b>	<b>Jenis</b>	<b>Aset Ditransfer</b>	<b>Akumulasi Transaksional</b>	<b>Nilai Buku Aset (Rp)</b>
Jumlah		0	0	0

Transfer Keluar merupakan pengiriman barang konsumsi berupa hasil cetakan dokumen survei serta peralatan dan mesin seperti kendaraan dinas roda-2 dan roda-4 serta alat untuk keperluan pendataan di lapangan ke satker BPS Kab/Kota se Provinsi Gorontalo.

*Ekuitas Akhir  
Rp20.829.919.198*

#### **E.5 Ekuitas Akhir**

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 adalah masing-masing sebesar Rp20.829.919.198 dan Rp21.862.708.638.

## F. PENGUNGKAPAN LAINNYA

- Bank Pemerintah yang digunakan BPS Provinsi Gorontalo adalah Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Gorontalo dengan rekening virtual dengan nomor dengan nomor 9890756369001000 atas nama BPg 050 BPS Provinsi Gorontalo dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp0,-
- Temuan BPK pada periode ini sudah ditindaklanjuti oleh seluruh satker di BPS yang langsung dikoordinasi oleh tim biro keuangan dan inspektorat dalam hal pemenuhan dan pengawalan sampai dengan penentuan hasil opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
- Adanya kerjasama Swakelola Tipe II Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023 antara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dengan Nomor: 632/Kontrak/PPK/Dep.4/VIII/2023 dan Nomor: B-1308/7500/HK.610/08/2023 kegiatan Pendataan Lengkap Koperasi, Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (PL-KUMKM) tahun 2023.
- Pengelolaan Anggaran Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo diselenggarakan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik RI Nomor : 345/PA/2023 tanggal 9 Desember 2022 Tentang Kuasa Pengguna Anggaran BPS TA 2023 di Wilayah Provinsi Gorontalo.
- Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran BPS Provinsi Gorontalo No.1208001/KPA/2022 tanggal 28 Desember 2022 Tentang Pengelola Anggaran BPS Provinsi Gorontalo Tahun 2023 yang berisi tentang penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberi Kewenangan untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Penangguna Jawab Kegiatan/ Pembuat komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani SPM,

dan Bendahara Pengeluaran sebagai berikut : Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Depit Rudianto, M.Ec.Dev sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sity Defriani Djou, SE sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan **Viliyan Indaka Ardhi sebagai Bendahara Pengeluaran.**

- Pada bulan Maret 2023 terjadi perubahan Bendahara Pengeluaran sesuai SK Perubahan Pertama Kepala Badan Pusat Statistik nomor: 03068001 Tahun 2023 tanggal 3 Maret 2023 sebagai berikut : Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Depit Rudianto, M.Ec.Dev sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sity Defriani Djou, SE sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan **Dwiyogo Ahmad sebagai Bendahara Pengeluaran.**

Pada bulan Mei 2023 terjadi perubahan Bendahara Pengeluaran sesuai SK Perubahan Pertama Kepala Badan Pusat Statistik nomor: 0522002 Tahun 2023 tanggal 22 Mei 2023 sebagai berikut : Mukhamad Mukhanif, S.Si, M.Si sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Depit Rudianto, M.Ec.Dev sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Sity Defriani Djou, SE sebagai Pejabat Penandatanganan SPM dan **Suciati Khusni Robi'ah sebagai Bendahara Pengeluaran.**

NERACA  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 054 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
WILAYAH/PROVINSI : ( 3100 ) GORONTALO  
SATUAN KERJA : ( 636900 ) BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 8:29 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_satker\_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Persediaan	215,629,620	668,930,088	(453,300,468)	(67.76)
<b>JUMLAH ASET LANCAR</b>	<b>215,629,620</b>	<b>668,930,088</b>	<b>(453,300,468)</b>	<b>(67.76)</b>
<b>ASET TETAP</b>				
Tanah	4,861,957,000	4,861,957,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	14,196,157,633	14,490,440,233	(294,282,600)	(2.03)
Gedung dan Bangunan	18,067,362,000	18,067,362,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	300,092,863	300,092,863	0	0.00
AKUMULASI PENYUSUTAN	(16,542,183,075)	(16,374,734,860)	(167,448,215)	1.02
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>20,883,386,421</b>	<b>21,345,117,236</b>	<b>(461,730,815)</b>	<b>(2.16)</b>
<b>ASET LAINNYA</b>				
Aset Tak Berwujud	1,663,672,500	1,663,672,500	0	0.00
Aset Lain-lain	115,056,727	825,904,271	(710,847,544)	(86.07)
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(1,770,912,592)	(2,369,804,391)	598,891,799	(25.27)
<b>JUMLAH ASET LAINNYA</b>	<b>7,816,635</b>	<b>119,772,380</b>	<b>(111,955,745)</b>	<b>(93.47)</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>21,106,832,676</b>	<b>22,133,819,704</b>	<b>(1,026,987,028)</b>	<b>(4.64)</b>
<b>KEWAJIBAN</b>				
<b>KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>				
Utang kepada Pihak Ketiga	276,913,478	271,111,066	5,802,412	2.14
<b>JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</b>	<b>276,913,478</b>	<b>271,111,066</b>	<b>5,802,412</b>	<b>2.14</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>	<b>276,913,478</b>	<b>271,111,066</b>	<b>5,802,412</b>	<b>2.14</b>
<b>EKUITAS</b>				
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas	20,829,919,198	21,862,708,638	(1,032,789,440)	(4.72)
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>20,829,919,198</b>	<b>21,862,708,638</b>	<b>(1,032,789,440)</b>	<b>(4.72)</b>
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>20,829,919,198</b>	<b>21,862,708,638</b>	<b>(1,032,789,440)</b>	<b>(4.72)</b>
<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS</b>	<b>21,106,832,676</b>	<b>22,133,819,704</b>	<b>(1,026,987,028)</b>	<b>(4.64)</b>

Keterangan :

FINAL

Gorontalo, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kepala

MUKHAMAD MUKHANIF, S.SI, M.S.I  
197206011994121001



NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 054 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
WILAYAH/PROVINSI : ( 3100 ) GORONTALO  
SATUAN KERJA : ( 636900 ) BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 8:29 AM

Halaman : 1

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	215,552,720	0
0.0	117113	Bahan untuk Pemeliharaan	76,900	0
0.0	131111	Tanah	4,861,957,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	14,196,157,633	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	18,067,362,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	300,092,863	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	13,763,658,946
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	2,778,524,129
0.0	162151	Software	1,614,128,500	0
0.0	162161	Lisensi	49,544,000	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	115,056,727	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	114,671,692
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	1,614,128,500
0.0	169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	0	42,112,400
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	275,970,153
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	943,325
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	17,064,088,746
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	3,514,098,492	0
0.0	313211	Transfer Keluar	721,678,464	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	56,553,322
0.0	391111	Ekuitas	0	21,862,708,638
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	6,521,450
3.0	425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	0	3,506,730,000
3.0	425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	0	847,042
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	2,342,410,367	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	38,326	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	143,256,610	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	38,245,590	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	63,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	383,074,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	10,613,659	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	119,637,840	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	317,379,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	33,919,870	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	14,832,500	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	480	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	2,700,000	0
0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	362,100	0



## NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 054 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
 UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
 WILAYAH/PROVINSI : ( 3100 ) GORONTALO  
 SATUAN KERJA : ( 636900 ) BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 8:29 AM

Halaman : 2

lap\_neraca\_percobaan\_akrual\_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	1,850,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	74,618,000	0
3.0	512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	3,645,928,583	0
3.0	512414	Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	13,117,944	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	255,602,613	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	124,380,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	4,500,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	419,926,834	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	2,318,765,880	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	31,031,415	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	7,377,800	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	267,655,222	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	2,852,219	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	7,256,600	0
3.0	522141	Beban Sewa	17,982,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	73,100,000	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	1,066,049,160	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	115,073,200	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	327,529,003	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	757,806,630	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	74,727,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2,595,672,361	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	459,244,070	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	282,789,348	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	394,007,048	0
3.0	592115	Beban Amortisasi Software	98,134,375	0
3.0	592116	Beban Amortisasi Lisensi	4,954,400	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	466,462,329	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	8,784,000	0
3.0	596111	Kerugian Pelepasan Aset	8,866,970	0
3.0	596121	Beban Persediaan Rusak/Usang	36,097,698	0
<b>JUMLAH</b>			<b>61,087,458,343</b>	<b>61,087,458,343</b>



Keterangan :

FINAL

Gorontalo, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kepala

MUKHAMAD MUKHANIF, S.SI, M.S.I  
197206011994121001



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK 054  
**ESELON I** : BADAN PUSAT STATISTIK 01  
**SATUAN KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO 636900

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 8:29 AM  
Halaman : 1  
lap\_ira\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>A. Pendapatan Negara Dan Hibah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I. Pendapatan Perpajakan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Pajak Dalam Negeri	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pajak Perdagangan Internasional	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak</b>	<b>3,515,587,000</b>	<b>3,514,098,492</b>	<b>(1,488,508)</b>	<b>100</b>	<b>6,800,000</b>	<b>107,127,099</b>	<b>100,327,099</b>	<b>1,575</b>
1. Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Pendapatan dari Kekayaan Negara Dipisahkan	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Pendapatan BLU	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,515,587,000	3,514,098,492	(1,488,508)	100	6,800,000	107,127,099	100,327,099	1,575
<b>III. Pendapatan Hibah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II + A.III)</b>	<b>3,515,587,000</b>	<b>3,514,098,492</b>	<b>(1,488,508)</b>	<b>100</b>	<b>6,800,000</b>	<b>107,127,099</b>	<b>100,327,099</b>	<b>1,575</b>
<b>B. Belanja Negara</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. Belanja Pemerintah Pusat</b>	<b>17,216,283,000</b>	<b>17,064,088,746</b>	<b>(152,194,254)</b>	<b>99</b>	<b>13,862,294,000</b>	<b>13,668,448,168</b>	<b>(193,845,832)</b>	<b>99</b>
1. Belanja Pegawai	7,218,351,000	7,199,489,082	(18,861,918)	100	7,893,910,000	7,802,591,100	(91,318,900)	99
2. Belanja Barang	9,801,321,000	9,668,232,164	(133,088,836)	99	5,932,384,000	5,831,034,568	(101,349,432)	98
3. Belanja Modal	196,611,000	196,367,500	(243,500)	100	36,000,000	34,822,500	(1,177,500)	97
4. Belanja Pembayaran Bunga Utang	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Belanja Subsidi	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Belanja Hibah	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Belanja Bantuan Sosial	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Belanja Lain-lain	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transfer ke Daerah</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN/LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK 054  
**ESELON I** : BADAN PUSAT STATISTIK 01  
**SATUAN KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO 636900

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM  
Tgl Cetak : 07/05/24 8:29 AM  
Halaman : 2  
lap\_lra\_face\_satker\_new

URAIAN	2023				2022			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	4	5	6	7	8	9	10
<b>a. Dana Perimbangan</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>1. Dana Transfer Umum</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Transfer Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>b. Dana Insentif Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>c. Dana Keistimewaan DIY</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>d. Dana Otonomi Khusus</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Dana Desa</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3. Hibah Kepada Daerah</b>	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)</b>	<b>17,216,283,000</b>	<b>17,064,088,746</b>	<b>(152,194,254)</b>	<b>99</b>	<b>13,862,294,000</b>	<b>13,668,448,168</b>	<b>(193,845,832)</b>	<b>99</b>
<b>C. PEMBIAYAAN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

Gorontalo, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kepala

MUKHAMAD MUKHANIF, S.SI, M.S.I  
197206011994121001



**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
**(DALAM RUPIAH)**



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 054 ) BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN PUSAT STATISTIK**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 3100 ) GORONTALO**  
**SATUAN KERJA : ( 636900 ) BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 8:23 AM

Halaman : 1

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	3,514,098,492	4,329,920	3,509,768,572	81,058.509
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	3,514,098,492	4,329,920	3,509,768,572	81,058.509
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	3,514,098,492	4,329,920	3,509,768,572	81,058.509
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	7,205,124,869	7,763,493,338	(558,368,469)	(7.192)
Beban Persediaan	466,462,329	378,429,736	88,032,593	23.263
Beban Barang dan Jasa	4,596,479,743	2,625,360,554	1,971,119,189	75.08
Beban Pemeliharaan	451,386,203	370,657,667	80,728,536	21.78
Beban Perjalanan Dinas	3,887,450,061	1,790,702,497	2,096,747,564	117.091
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	



**LAPORAN OPERASIONAL**  
**TINGKAT SATUAN KERJA**  
**PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**  
(DALAM RUPIAH)



**KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 054 ) BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN PUSAT STATISTIK**  
**WILAYAH/PROVINSI : ( 3100 ) GORONTALO**  
**SATUAN KERJA : ( 636900 ) BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 07/05/24 6:26 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 8:23 AM

Halaman : 2

lap\_lo\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	779,885,171	1,132,353,385	(352,468,214)	(31.127)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
<b>JUMLAH BEBAN</b>	<b>17,386,788,376</b>	<b>14,060,997,177</b>	<b>3,325,791,199</b>	<b>23.653</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL</b>	<b>(13,872,689,884)</b>	<b>(14,056,667,257)</b>	<b>183,977,373</b>	<b>(1.309)</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	(8,866,970)	0	(8,866,970)	()
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	8,866,970	0	8,866,970	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	(36,097,698)	115,311,656	(151,409,354)	(131.304)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	115,311,656	(115,311,656)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	36,097,698	0	36,097,698	
<b>JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>	<b>(44,964,668)</b>	<b>115,311,656</b>	<b>(160,276,324)</b>	<b>(138.994)</b>
<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>(13,917,654,552)</b>	<b>(13,941,355,601)</b>	<b>23,701,049</b>	<b>(0.17)</b>
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
<b>POS LUAR BIASA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>SURPLUS/DEFISIT - LO</b>	<b>(13,917,654,552)</b>	<b>(13,941,355,601)</b>	<b>23,701,049</b>	<b>(0.17)</b>



Keterangan :

FINAL

Gorontalo, 7 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPA  
Kepala

MUKHAMAD MUKHANIF, S.SI, M.S.I  
197206011994121001



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS  
TINGKAT SATUAN KERJA  
PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : ( 054 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
UNIT ORGANISASI : ( 01 ) BADAN PUSAT STATISTIK  
WILAYAH/PROVINSI : ( 3100 ) GORONTALO  
SATUAN KERJA : ( 636900 ) BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO

Tgl Data : 07/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 07/05/24 8:25 AM

Halaman : 1

lap\_lpe\_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	21,862,708,638	22,572,954,671	(710,246,033)	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(13,917,654,552)	(13,941,355,601)	23,701,049	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	12,884,865,112	13,231,109,568	(346,244,456)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1,032,789,440)	(710,246,033)	(322,543,407)	-
EKUITAS AKHIR	20,829,919,198	21,862,708,638	(1,032,789,440)	-

Keterangan :

FINAL

Gorontalo, 7 Mei 2024

Penanggung Jawab UAKPA

Kepala

MUKHAMAD MUKHANIF, S.SI, M.S.I

197206011994121001



**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA  
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2023 - AUDITED  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**UAPB : 054**                      **BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UAKPB : 636900**                **BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl.Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl.Cetak : 08/05/24 9:30 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_neraca\_face\_satker

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	215,552,720
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	76,900
131111	Tanah	4,861,957,000
132111	Peralatan dan Mesin	14,196,157,633
133111	Gedung dan Bangunan	18,067,362,000
135121	Aset Tetap Lainnya	300,092,863
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(13,763,658,946)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2,778,524,129)
162151	Software	1,614,128,500
162161	Lisensi	49,544,000
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	115,056,727
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(114,671,692)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(1,614,128,500)
169316	Akumulasi Amortisasi Lisensi	(42,112,400)
<b>J U M L A H</b>		<b>21,106,832,676</b>

Gorontalo, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KPB

Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
197206011994121001



**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA  
ASET TAK BERWUJUD  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 054**                      **BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UAKPB : 636900**                **BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tanggal : 08/05/24 9:29 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_atb\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>162151</b>	<b>Software</b>		<b>37</b>	<b>1,614,128,500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37</b>	<b>1,614,128,500</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	37	1,614,128,500	0	0	0	0	37	1,614,128,500
<b>162161</b>	<b>Lisensi</b>		<b>3</b>	<b>49,544,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>49,544,000</b>
80101	ASET TAK BERWUJUD	null	3	49,544,000	0	0	0	0	3	49,544,000
<b>TOTAL</b>				<b>1,663,672,500</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>1,663,672,500</b>

Gorontalo, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KPB

Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
197206011994121001



**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 054**                      **BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UAKPB : 636900**                **BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 25/05/23 6:00 PM  
Tgl Cetak : 08/05/24 9:28 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_ekstra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
					BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>35</b>	<b>30,092,009</b>	<b>17</b>	<b>7,377,800</b>	<b>2</b>	<b>513,000</b>	<b>50</b>	<b>36,956,809</b>
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	6	4,324,900	10	5,559,200	0	0	16	9,884,100
30601	ALAT STUDIO	-	29	25,767,109	0	0	0	0	29	25,767,109
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	0	0	1	922,600	0	0	1	922,600
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	2	513,000	2	513,000	0	0
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	0	0	4	383,000	0	0	4	383,000
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>1</b>	<b>19,151,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>19,151,000</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	19,151,000	0	0	0	0	1	19,151,000
<b>TOTAL</b>				<b>49,243,009</b>		<b>7,377,800</b>		<b>513,000</b>		<b>56,107,809</b>

Gorontalo, 30 Juni 2022  
Penanggung Jawab UAKPB  
KPB

Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
197206011994121001



**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 054**                      **BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UAKPB : 636900**                **BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM

Tgl Cetak : 08/05/24 9:29 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap\_bmn\_gab\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SATUAN	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>4,824</b>	<b>4,861,957,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,824</b>	<b>4,861,957,000</b>
20101	TANAH PERSIL	-	4,824	4,861,957,000	0	0	0	0	4,824	4,861,957,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1,081</b>	<b>14,520,532,242</b>	<b>28</b>	<b>398,745,300</b>	<b>12</b>	<b>686,163,100</b>	<b>1,097</b>	<b>14,233,114,442</b>
30103	ALAT BANTU	-	4	1,191,300,766	0	0	0	0	4	1,191,300,766
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	27	1,886,129,600	1	195,000,000	8	675,182,600	20	1,405,947,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	2	4,050,000	0	0	0	0	2	4,050,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	5	20,209,740	0	0	0	0	5	20,209,740
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	1	9,059,600	2	10,467,500	2	10,467,500	1	9,059,600
30501	ALAT KANTOR	-	137	970,905,099	0	0	0	0	137	970,905,099
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	572	2,261,926,880	16	160,359,200	0	0	588	2,422,286,080
30601	ALAT STUDIO	-	76	488,579,019	1	10,100,000	0	0	77	498,679,019
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	44,271,500	0	0	0	0	2	44,271,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	6,998,200	0	0	0	0	2	6,998,200
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	13,160,000	1	922,600	0	0	2	14,082,600
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	-	0	0	2	513,000	2	513,000	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	150	2,486,777,039	0	0	0	0	150	2,486,777,039
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	100	5,122,184,799	1	21,000,000	0	0	101	5,143,184,799
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	2	14,980,000	4	383,000	0	0	6	15,363,000
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>17</b>	<b>18,086,513,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>18,086,513,000</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	8	16,527,329,000	0	0	0	0	8	16,527,329,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7	1,000,305,000	0	0	0	0	7	1,000,305,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	558,879,000	0	0	0	0	2	558,879,000
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>4,901</b>	<b>300,092,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,901</b>	<b>300,092,863</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	4,901	300,092,863	0	0	0	0	4,901	300,092,863
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>299</b>	<b>825,904,271</b>	<b>2</b>	<b>100,676,000</b>	<b>292</b>	<b>811,523,544</b>	<b>9</b>	<b>115,056,727</b>
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	2	100,676,000	0	0	2	100,676,000
30303	ALAT UKUR	-	20	47,388,000	0	0	20	47,388,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	3	16,445,196	0	0	3	16,445,196	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	13	69,132,974	0	0	13	69,132,974	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	30	420,856,918	0	0	29	406,861,226	1	13,995,692
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	3	262,829,178	0	0	3	262,829,178	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	230	9,252,005	0	0	224	8,866,970	6	385,035
<b>TOTAL</b>				<b>38,594,999,376</b>		<b>499,421,300</b>		<b>1,497,686,644</b>		<b>37,596,734,032</b>



Gorontalo, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KPB

Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
197206011994121001



**LAPORAN BARANG PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 054 BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UAKPB : 636900 BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 9:28 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_intra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO PER 1 JANUARI 2023		MUTASI				SALDO PER 31 DESEMBER 2023 - AUDITED	
			KUANTITAS	NILAI	BERTAMBAH		BERKURANG		KUANTITAS	NILAI
KODE	URAIAN				KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>4,824</b>	<b>4,861,957,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,824</b>	<b>4,861,957,000</b>
20101	TANAH PERSIL	-	4,824	4,861,957,000	0	0	0	0	4,824	4,861,957,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1,046</b>	<b>14,490,440,233</b>	<b>11</b>	<b>391,367,500</b>	<b>10</b>	<b>685,650,100</b>	<b>1,047</b>	<b>14,196,157,633</b>
30103	ALAT BANTU	-	4	1,191,300,766	0	0	0	0	4	1,191,300,766
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	27	1,886,129,600	1	195,000,000	8	675,182,600	20	1,405,947,000
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	2	4,050,000	0	0	0	0	2	4,050,000
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	5	20,209,740	0	0	0	0	5	20,209,740
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	1	9,059,600	2	10,467,500	2	10,467,500	1	9,059,600
30501	ALAT KANTOR	-	137	970,905,099	0	0	0	0	137	970,905,099
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	566	2,257,601,980	6	154,800,000	0	0	572	2,412,401,980
30601	ALAT STUDIO	-	47	462,811,910	1	10,100,000	0	0	48	472,911,910
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	44,271,500	0	0	0	0	2	44,271,500
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	6,998,200	0	0	0	0	2	6,998,200
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	13,160,000	0	0	0	0	1	13,160,000
31001	KOMPUTER UNIT	-	150	2,486,777,039	0	0	0	0	150	2,486,777,039
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	100	5,122,184,799	1	21,000,000	0	0	101	5,143,184,799
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	2	14,980,000	0	0	0	0	2	14,980,000
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>16</b>	<b>18,067,362,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16</b>	<b>18,067,362,000</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	7	16,508,178,000	0	0	0	0	7	16,508,178,000
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7	1,000,305,000	0	0	0	0	7	1,000,305,000
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	558,879,000	0	0	0	0	2	558,879,000
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>4,901</b>	<b>300,092,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,901</b>	<b>300,092,863</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	4,901	300,092,863	0	0	0	0	4,901	300,092,863
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>299</b>	<b>825,904,271</b>	<b>2</b>	<b>100,676,000</b>	<b>292</b>	<b>811,523,544</b>	<b>9</b>	<b>115,056,727</b>
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	0	0	2	100,676,000	0	0	2	100,676,000
30303	ALAT UKUR	-	20	47,388,000	0	0	20	47,388,000	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	3	16,445,196	0	0	3	16,445,196	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	13	69,132,974	0	0	13	69,132,974	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	30	420,856,918	0	0	29	406,861,226	1	13,995,692
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	3	262,829,178	0	0	3	262,829,178	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	230	9,252,005	0	0	224	8,866,970	6	385,035
<b>TOTAL</b>				<b>38,545,756,367</b>		<b>492,043,500</b>		<b>1,497,173,644</b>		<b>37,540,626,223</b>



Gorontalo, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KPB

Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
197206011994121001



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
EKSTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 054 BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UAKPB : 636900 BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 9:30 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_ekstra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
132111	Peralatan dan Mesin		50	36,956,809	(19,334,426)	(6,978,453)	0	(26,312,879)	10,643,930
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	16	9,884,100	(1,297,470)	(1,512,820)	0	(2,810,290)	7,073,810
30601	ALAT STUDIO	-	29	25,767,109	(18,036,956)	(5,153,445)	0	(23,190,401)	2,576,708
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	922,600	0	(184,520)	0	(184,520)	738,080
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	4	383,000	0	(127,668)	0	(127,668)	255,332
133111	Gedung dan Bangunan		1	19,151,000	(1,915,100)	(383,020)	0	(2,298,120)	16,852,880
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	1	19,151,000	(1,915,100)	(383,020)	0	(2,298,120)	16,852,880
<b>JUMLAH</b>			<b>51</b>	<b>56,107,809</b>	<b>(21,249,526)</b>	<b>(7,361,473)</b>	<b>0</b>	<b>(28,610,999)</b>	<b>27,496,810</b>

Gorontalo, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KPB

Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
197206011994121001



**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA  
INTRAKOMPTABEL  
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG  
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 - AUDITED**

**UAPB : 054 BADAN PUSAT STATISTIK**  
**UAKPB : 636900 BADAN PUSAT STATISTIK.PROP. GORONTALO**

Tgl Data : 08/05/24 6:00 AM  
Tgl Cetak : 08/05/24 9:29 AM  
Halaman : 1  
Kode Lap : lap\_bmn\_susut\_intra\_kel\_satker

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 31 DESEMBER 2023 - AUDITED						
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	AKUMULASI PENYUSUTAN				NILAI BUKU
					SALDO AWAL	BEBAN PENYUSUTAN	KOREKSI	TOTAL	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=6+7+8	10=5-9
<b>131111</b>	<b>Tanah</b>		<b>4,824</b>	<b>4,861,957,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,861,957,000</b>
20101	TANAH PERSIL	-	4,824	4,861,957,000	0	0	0	0	4,861,957,000
<b>132111</b>	<b>Peralatan dan Mesin</b>		<b>1,047</b>	<b>14,196,157,633</b>	<b>(13,990,217,779)</b>	<b>226,558,833</b>	<b>0</b>	<b>(13,763,658,946)</b>	<b>432,498,687</b>
30103	ALAT BANTU	-	4	1,191,300,766	(1,190,525,765)	(221,429)	0	(1,190,747,194)	553,572
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	20	1,405,947,000	(1,664,622,456)	420,275,457	0	(1,244,346,999)	161,600,001
30202	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	-	2	4,050,000	(4,050,000)	0	0	(4,050,000)	0
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	-	5	20,209,740	(19,865,418)	(229,548)	0	(20,094,966)	114,774
30401	ALAT PENGOLAHAN	-	1	9,059,600	(9,059,600)	0	0	(9,059,600)	0
30501	ALAT KANTOR	-	137	970,905,099	(970,905,099)	0	0	(970,905,099)	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	572	2,412,401,980	(2,206,494,433)	(34,459,777)	0	(2,240,954,210)	171,447,770
30601	ALAT STUDIO	-	48	472,911,910	(440,770,170)	(12,912,560)	0	(453,682,730)	19,229,180
30602	ALAT KOMUNIKASI	-	2	44,271,500	(44,271,500)	0	0	(44,271,500)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	-	2	6,998,200	(4,198,920)	(1,399,640)	0	(5,598,560)	1,399,640
30702	ALAT KESEHATAN UMUM	-	1	13,160,000	(13,160,000)	0	0	(13,160,000)	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	150	2,486,777,039	(2,363,601,716)	(103,777,823)	0	(2,467,379,539)	19,397,500
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	101	5,143,184,799	(5,043,712,702)	(40,715,847)	0	(5,084,428,549)	58,756,250
31901	PERALATAN OLAH RAGA	-	2	14,980,000	(14,980,000)	0	0	(14,980,000)	0
<b>133111</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>		<b>16</b>	<b>18,067,362,000</b>	<b>(2,384,517,081)</b>	<b>(394,007,048)</b>	<b>0</b>	<b>(2,778,524,129)</b>	<b>15,288,837,871</b>
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	-	7	16,508,178,000	(2,140,148,188)	(354,331,680)	0	(2,494,479,868)	14,013,698,132
40102	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	-	7	1,000,305,000	(156,441,306)	(25,123,336)	0	(181,564,642)	818,740,358
40401	TUGU/TANDA BATAS	-	2	558,879,000	(87,927,587)	(14,552,032)	0	(102,479,619)	456,399,381
<b>135121</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>		<b>4,901</b>	<b>300,092,863</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300,092,863</b>
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	4,901	300,092,863	0	0	0	0	300,092,863
<b>166112</b>	<b>Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan</b>		<b>9</b>	<b>115,056,727</b>	<b>(816,652,266)</b>	<b>701,980,574</b>	<b>0</b>	<b>(114,671,692)</b>	<b>385,035</b>
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	-	2	100,676,000	0	(100,676,000)	0	(100,676,000)	0
30303	ALAT UKUR	-	0	0	(47,388,000)	47,388,000	0	0	0
30501	ALAT KANTOR	-	0	0	(16,445,196)	16,445,196	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	-	0	0	(69,132,974)	69,132,974	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	-	1	13,995,692	(420,856,918)	406,861,226	0	(13,995,692)	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	-	0	0	(262,829,178)	262,829,178	0	0	0
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	-	6	385,035	0	0	0	0	385,035
<b>JUMLAH</b>			<b>10,797</b>	<b>37,540,626,223</b>	<b>(17,191,387,126)</b>	<b>534,532,359</b>	<b>0</b>	<b>(16,656,854,767)</b>	<b>20,883,771,456</b>



Gorontalo, 8 Mei 2024  
Penanggung Jawab UAKPB  
KPB

Mukhamad Mukhanif S.Si, M.Si  
197206011994121001

